

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Sri Kasiami

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 2 Bojonegoro

Email: sri.kasiami@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the obstacles that occur in the distribution of subsidized fertilizers through farmer cards in Bojonegoro Regency. The method used is a qualitative approach with data collection observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while the number of informants inventoried a number of 72 people. Data analysis used data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification, with the technique of taking informants using purposive sampling technique. The focus of the research refers to the content of policies, information, support, and potential distribution in the distribution of subsidized fertilizers. The results show that the content of the policy is still the main obstacle. The district government's lack of courage in initiating policies that are tailored to local needs.

Keywords: Barriers, Subsidized Fertilizer, Farmer Card

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentas. Penentuan informan menggunakan purposive sampling, adapun informan terinventarisir sejumlah sejumlah 72 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification, dengan teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian mengacu pada isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan, isi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Ketidakberanian pemerintah kabupaten dalam menginisiasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan local.

Kata kunci: Hambatan, Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam dibidang agraris. Salah satu sektor penggerak perekonomian dan kontribusinya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perekonomian nasional Indonesia adalah sektor pertanian. Sehingga sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian adalah salah satu sektor penyokong perekonomian nasional, maka usaha pertanian juga harus dibantu semaksimal mungkin agar produktivitas pertanian tidak mengalami penurunan dari sisi kualitas maupun kuantitas, dari sini peran pemerintah akan sangat berarti dalam pembangunan pertanian nasional, guna tercapainya swasembada pangan nasional.

Dalam mengupayakan kesejahteraan petani di Indonesia perlu adanya pembangunan ke arah yang lebih baik lagi. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa "*nation building*". Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang menarik perhatian pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. yang tidak hanya ditunjukkan untuk mensejahterakan petani semata, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*).

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapat perhatian serius pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sejauh ini, pemerintah telah berupaya mengimplementasikan berbagai program kebijakan untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Sektor pertanian adalah sektor yang dalam proses produksinya membutuhkan berbagai input atau faktor

dukungan dalam produksinya, Seperti halnya pupuk yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Istilah input mengandung makna semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses. Maka dengan ini pemerintah mengeluarkan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi juga diatur Peraturan Menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun pada saat pendistribusiannya ditemukan berbagai masalah yang dihadapi. Di antaranya adalah panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk ini menimbulkan kelangkaan pupuk serta pengoplosan pupuk subsidi dan non-subsidi.

Permasalahan yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi meliputi kelangkaan pupuk, harga yang fluktuatif, serta penggunaan pupuk oleh petani yang sering kali melebihi dosis anjuran. Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi diakibatkan karena kebutuhan akan pupuk yang tinggi sedangkan ketersediaan ditingkat pengecer atau penjual serta distributor rendah. Seringkali ketika dibutuhkan persediaan tidak ada dan mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat. Hal tersebut karena ketidakmerataan akan distribusi pupuk

bersubsidi baik ditingkat distributor wilayah maupun di tingkat petani.

Usaha pemerintah dalam menangani masalah tersebut dengan kembali membuat program kebijakan yang memanfaatkan teknologi yang modern dan diharapkan tepat sasaran, Salah satunya adalah melalui program kebijakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Kartu tani adalah sebuah alat transaksi berupa kartu debit yang multifungsi yang memuat informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan saprotan, informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan untuk transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman dan lebih utama sebagai data penerima subsidi dan bantuan pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) yang terdiri dari Bank Mandiri untuk Provinsi Jawa Barat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk Provinsi Jawa Tengah, Bank Tabungan Negara (BTN) untuk Provinsi Banten, dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk Provinsi Jawa Timur.

Kartu tani sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan implementasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi petani yang berhak menerima. Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu : kementerian koordinator perekonomian, kementerian Dalam Negeri, kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan,

Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota.

Sejak tahun 2017 pemerintah mempunyai kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tani. Tahun 2017 sudah dimulai uji coba pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Pada Tahun 2018 Uji coba diperluas ke 10 Provinsi yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat.

Dengan upaya pemerintah menerapkan e-RDKK dan Kartu Tani, diharapkan tidak akan lagi ada kelangkaan pupuk. Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) adalah sistem yang ada di dalam kartu tani yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani. Dari data petani yang diajukan semua provinsi ada 16 juta orang, yang masuk program Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) tercatat ada 10 juta petani, Namun, saat ini terealisasi terdapat 6 juta kartu tani yang disebarakan sebagian besar ada di pulau Jawa.

Bojonegoro menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang dahulu mendapat distribusi Kartu Tani pada Tahun 2017. Dan menurut Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro telah membagikan 172.266 kartu tani kepada petani di 28 kecamatan di Bojonegoro. Meski demikian, kartu tani yang sudah tersebar merata di 28 kecamatan. Namun, dalam penerapannya beberapa petani mengaku belum bisa mengakses kemudahan dan manfaat kartu tani seperti yang dijanjikan oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan, karena kartu tani belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi. Dari data yang diperoleh dari dinas pertanian terdapat 3 kecamatan yang membagikan kartu tani melebihi data e-

RDKK diantaranya Kalitidu, Kanor, Tambakrejo. dalam hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan pendistribusian kartu tani sesuai e-RDKK. Dan hal lain yang mempengaruhi terhambatnya proses penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani adalah kendala-kendala yang dihadapi stakeholder yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (THL) yang bertugas mendata penerima Kartu Tani sebagai alat untuk menebus pupuk bersubsidi.

Kendala di lapangan sangat dirasakan oleh para petugas THL untuk mendata luas lahan belum lagi alokasi pupuk yang bakal didapatkan para petani, tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar. Data alokasi itupun senantiasa harus diperbarui oleh THL setiap perubahan musim tanam. Satu THL membawahi 4 desa jika dalam 4 desa itu terdapat kurang lebih 3 ribu petani maka bisa dibayangkan kesulitan anggota THL. Lamanya proses pendataan itu akan membuat mandek dan terhambatnya proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Secara teoritik, hambatan adalah hal-hal yang bersifat melemahkan dan cenderung menghalangi tercapainya suatu tujuan. Menurut Effendi (2000) dan Darwin (1999), ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan. Oleh Darwin (1999) ditegaskan karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi. Pertanyaan sama ditegaskan Edward II (1980:2), bahwa “*what are the preconditions for succesful policy implemmentation?*”. prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan/kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan.

Dalam implementasi kebijakan negara, masyarakat seharusnya perlu mengetahui dan melaksanakan

kebijaksanaan. Menurut Anderson dalam Islamy (2000:108-110), ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat mengikutinya. Antara lain adalah: (a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah. Sejak lahir manusia telah dididik untuk patuh dan memberikan respek kepada otoritas orang tua, norma atau hukum, pejabat pemerintah, terutama bila hal ini dianggap cukup belasan atau masuk akal. (b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan. Banyak orang menerima dan melaksanakan kebijaksanaan negara sebagai sesuatu yang logis, perlu dan adil.

Kemudian, (c) Adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan oleh pejabat yang berwenang untu itu serta melalui prosedur yang benar. Suatu kebijaksanaan Negara dibuat berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat cenderung mempunyai kesadaran diri untuk menerima dan melaksanakan kebijaksanaan tersebut. (d) Adanya kepentingan pribadi.seseorang atau kelompok sering menerima kepentingan yang langsung dengan menerima dan melaksanakan kebijakan negara karena sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoritik yang ada, penulis tertarik untuk menelaah dalam sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan apa saja bentuk hambatan-hambatan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro dengan informan penelitian dari Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian mengacu pada factor-fakor yang

menjadi penghambat kebijakan dari Bambang Sunggono (1994), yang mengacu pada empat indikator utama, yakni: (1) isi kebijakan, (2) informasi, (3) dukungan, dan (4) pembagian potensi. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data 72 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif Model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Isi kebijakan

Isi kebijakan meliputi 1) samarnya isi kebijakan 2) kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan 3) kekurangan-kekurangan yang sangat berarti, dan 4) kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu.

1. Samarnya isi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi isi kebijakan dalam program kebijakan ini tujuannya sudah cukup terperinci dan jelas. Bahwa kartu tani tersebut digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi, dan yang memperoleh pupuk bersubsidi dibuktikan dengan yang mempunyai kartu tani tersebut. Pemilik kartu tani adalah penggarap atau pemilik sawah. Sedangkan sarana-sarana penerapan prioritas seperti kartu tani sebagai alat utama untuk penebusan pupuk bersubsidi, kios pengecer resmi sebagai pihak yang menjual pupuk bersubsidi, EDC (Electure Data Capture), dan pupuk.

Dan sarana prasarana sebagai faktor pendukung dalam menunjang program kartu tani ini

belum semuanya ada mulai dari kartu tani yang belum terdistribusi atau terbagi secara keseluruhan, dan alokasi pupuk bersubsidi yang sangat kurang jika disesuaikan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi di e-RDKK. hal ini yang menjadi penyebab utama terhambatnya program kebijakan ini.

Jikapun kartu tani sudah terbagi semua secara keseluruhan namun alokasi pupuk bersubsidi alokasinya masih kurang, maka program kebijakan ini belum bisa dijalankan karena kendala utama memang pada alokasi pupuk yang belum sesuai dengan jumlah alokasi di e-RDKK para petani.

2. Kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan

Di sini kurangnya ketetapan internal maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan standar operasional prosedur pelaksanaan program kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini semua dari pusat. Dari pihak internal kabupaten Bojonegoro tidak ada standar operasional khusus untuk kartu tani ini sendiri guna mendukung jalannya program kebijakan ini, kurangnya inovasi dinas pertanian untuk mengapresiasi kebijakan level desa melalui teknis ketetapan standar operasional prosedur level desa belum ada.

3. Kekurangan-kekurangan yang sangat berarti

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti diantaranya, minimumnya alokasi pupuk bersubsidi setelah terdistribusinya kartu tani, kartu tani yang baru sampai pada tahap verifikasi dan pendataannya saja,

aplikasi kartu tani yang tidak bisa menerima data yang telah dikirim dan letak kesalahannya belum jelas dan Pemegang kartu tani rata-rata akan beranggapan lebih ribet menggunakan kartu tani, karena mereka beranggapan sama-sama membayar menggunakan kartu tani maupun tidak. Petani/ penggarap yang memiliki garapan di beberapa tempat beda desa ribet mau nebus pupuknya dimana karena 1 petani/penggarap 1 kartu bisa ditebus di satu kios dan adanya pergantian penggarap bagi lahan sewa, dan NIK petani yang tidak valid belum bisa menerima kartu tani.

4. Kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya- sumber daya pembantu.

Kurangnya tenaga harian lepas yang betugas dilapangan, kurangnya perpanjangan waktu mengingat terbatasnya tenaga pelaksana bagian lapangan. Dan juga Adanya tidak kesesuaian insentif dengan beban kerja sangat berpengaruh. Pada bagian petugas di lapangan yang sangat terbatas dan akibat petugas lapangan yang terbatas tugas mereka semakin bertambah. Namun tidak ada anggaran untuk tunjangan atau reward apapun. Hanya tunjangan yang didapat langsung dari pusat. tidak adanya insentif bisa menjadikan petugas lapangan atau tenaga harian lepas kinejanya semakin menurun. Pentingnya suatu anggaran mempengaruhi terwujudnya tujuan program ini.

b. Informasi

Para pelaksana kebijakan masih saling menjaga informasi dengan baik, hal ini didukung oleh media komunikasi dari telepon genggam yang membentuk group whatsapp untuk saling terhubung dan berkoordinasi dengan baik antar

pelaksana seperti dinas pertanian dengan para korluh (koordinator penyuluh), kemudian korluh (koordinator penyuluh) dengan THL/ tenaga harian lepas. Kemudian pihak THL/ tenaga harian lepas menginformasikan secara langsung kepada kelompok tani. Keberlangsungan program dapat diketahui dengan baik oleh semua implementor melalui media komunikasi yang digunakan.

c. Dukungan

Pihak korluh dan dinas pertanian serta kelompok tani tidak menunjukkan penolakan terhadap program kebijakan ini, namun sebaliknya mereka sangat mendukung program kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani tersebut. Mereka menyatakan bahwa kartu tani ini tujuannya bagus dan perlu diterapkan. Dalam hal ini, manfaat katu tani tidak sebatas sebagai alat penyaluran pupuk bersubsidi saja tapi juga bank-bank BUMN akan menggunakan kartu tani sebagai data penyaluran penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, Pembuat kebijakan harus memberikan perhatian khusus demi kelancaran program sehingga kebijakan dapat berjalan dengan lancar tidak ada kendala atau terbengkalai. Seperti ketersediaan pupuk bersubsidi yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Maka dari ini jika penerapan suatu program kebijakan dengan skala nasional harus dimaklumi jika membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

d. Pembagian Potensi

Dalam praktik pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kabupaten Bojonegoro pembagian potensi telah dilaksanakan dengan baik, bentuk koordinasi THL dan Korluh mengenai keberlangsungan program, kemudian dilapangan THL melakukan koordinasi

atau pendampingan dengan kelompok tani serta pemilik kios mengenai pendataan di lapangan untuk alokasi dan mekanisme baru pelaksanaan penebusan pupuk bersubsidi dalam penyusunan RDKK di kelompok tani.

Selanjutnya jika sudah didapatkan data yang sesuai di lapangan dan status petani, Kemudian THL akan kembali berkoordinasi dengan korluh kecamatan untuk dilakukan verifikasi kemudian pengolah data dari Dinas pertanian melakukan verifikasi data secara berjenjang, selanjutnya korluh akan koordinasi dengan pihak dinas pertanian dan pihak dinas pertanian akan koordinasi dengan pihak BNI, data yang sesuai dengan persyaratan perbankan akan dilaksanakan penerbitan kartu tani. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani dapat disimpulkan bahwa para pelaksana yang terlibat telah berkoordinasi dengan baik. Para pelaksana kebijakan telah berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing yang telah diberikan.

SIMPULAN

Mengacu pada penyajian data dan informasi penelitian, maka guna memberikan makna atau pengertian di atas, maka langkah berikutnya adalah diadakan analisa data yang kemudian diinterpretasikan atau dimaknai, yakni sebagai berikut :

a. Isi kebijakan

1. Samarnya isi kebijakan

Isi kebijakan dalam program kebijakan ini tujuannya sudah cukup terperinci dan jelas. bahwa kartu tani tersebut digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi, dan yang memperoleh pupuk bersubsidi dibuktikan dengan yang mempunyai kartu tani tersebut. Sedangkan sarana-sarana penerapan prioritas seperti kartu tani sebagai alat

utama untuk penebusan pupuk bersubsidi, kios pengecer resmi sebagai pihak yang menjual pupuk bersubsidi, EDC (Electure Data Capture), dan pupuk. dan sarana prasarana sebagai faktor pendukung dalam menunjang program kartu tani ini belum semuanya ada mulai dari kartu tani yang belum terdistribusi atau terbagi secara keseluruhan, dan alokasi pupuk bersubsidi yang sangat kurang jika disesuaikan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi di e-RDKK. hal ini yang menjadi penyebab utama terhambatnya program kebijakan ini.

2. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan

Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, standar operasional prosedur pelaksanaan program kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini semua dari pusat. pihak internal Kabupaten Bojonegoro tidak ada standar operasional Prosedur khusus untuk kartu tani ini sendiri guna mendukung jalannya program kebijakan ini.

3. Kekurangan-kekurangan yang sangat berarti

Minimumnya alokasi pupuk bersubsidi setelah terdistribusinya kartu tani, kartu tani yang baru sampai pada tahap verifikasi dan pendataannya saja, aplikasi kartu tani yang tidak bisa menerima data yang telah dikirim dan letak kesalahannya belum jelas dan Pemegang kartu tani rata-rata akan beranggapan lebih ribet menggunakan kartu tani, karena mereka beranggapan sama-sama membayar menggunakan kartu tani maupun tidak. Petani/ penggarap yang memiliki garapan di beberapa tempat beda desa ribet mau nebus pupuknya dimana karena 1 petani/penggarap 1 kartu bisa ditebus di satu kios dan adanya pergantian penggarap

bagi lahan sewa, dan NIK petani yang tidak valid belum bisa menerima kartu tani.

4. Kekurangan sumber daya-sumber daya pembantu

Kurangnya tenaga harian lepas yang betugas dilapangan, kurangnya perpanjangan waktu mengingat terbatasnya tenaga pelaksana bagian lapangan. Dan juga Adanya tidak kesesuaian insentif dengan beban kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan ini.

b. Informasi

Para pelaksana kebijakan masih saling menjaga informasi dengan baik, hal ini didukung oleh media komunikasi dari telepon genggam yang membentuk group whatsapp untuk saling terhubung dan berkoordinasi dengan baik.

c. Dukungan

Pihak korluh dan dinas pertanian serta kelompok tani tidak menunjukkan penolakan terhadap program kebijakan ini, namun sebaliknya mereka sangat mendukung program kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani tersebut.

d. Pembagian Potensi

Pembagian potensi telah dilaksanakan dengan baik, bentuk koordinasi THL dan Korluh selanjutnya korluh akan koordinasi dengan pihak dinas pertanian dan pihak dinas pertanian akan koordinasi dengan pihak BNI, data yang sesuai dengan persyaratan perbankan akan dilaksanakan penerbitkan kartu tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015

Pasolong Harbani, *Metode penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011

Suntoro Irawan dan Hariri Hasan, *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016

Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Tahir Arifin, *Kebijakan Publik & Transparansi*, Alfabeta, Bandung, 2015

Peraturan-peraturan

Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011, *Tentang penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan*.

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, *yang mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian*

Peraturan Menteri pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/12/2017, *Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018*.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro*, Bojonegoro, Bojonegoro, 2016

Jurnal

Ashari Latifa, Hariani Dyah, *Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro, Volume 8, No 2, Semarang, 2019

Nur mufidah, *Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui*

*kartu tani di Desa Durung Bedug
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya, Volume 6,
No 9, Surabaya, 2018*

Isye Nuriyah Agindawati, *Implementasi
Kebijakan publik dari Perspektif
Penyelenggara Pengawasan*, BPSDM
Provinsi Jawa Barat, Volume 10, Nomor
1, Jawa Barat, 2019